

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA BARANG DAN JASA DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)**

Indra Wijayanto
Universitas Merdeka Malang
Email: indraalvito@gmail.com

ABSTRACT

The goal of this research are to test the direct influence of General Allocation Found (DAU), Regional Original Income (PAD), and the indirect influence through Capital Expense as a intervening variable toward Product and Service Expense of Local Government East Java in 2019. This kind of research is a quantitative research, using classic assumption test for the examining research model, the multiple regression test for intervening variable test. The data of this research are the secondary data that is the APBD realization report year 2019 obtained from the website of the General Directorate of Financial Balance (www.djpk.depkeu.go.id). The number of research population is 38 districts/cities in East Java and of 33 districts/cities that meet the requirement to be the sample of research. The result of research shows that the General Allocation Found (DAU) and Regional Original Income (PAD) affect positively toward the Capital Expense, the Capital Expense affect positively toward the Product and Service Expense, and than General Allocation Found (DAU) that has the significant positive affect indirectly to the Product and Service Expense through the Capital Expense as the intervening variable. The result of this research expected can be input for government in making policy in the future.

Keyword : General Allocation Found (DAU), Regional Original Income (PAD), Capital Expense, and Product and Service Expense.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2016). Subagyo (2017) menyatakan bahwa keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang telah membawa implikasi yang luas dan serius.

Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Pelaksanaan otonomi daerah didukung adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Puspita Sari, 2010).

Menurut Halim (2012) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi

Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Puspita Sari (2010) yaitu "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau" dengan periode penelitian dari tahun 2005-2008 serta penelitian yang dilakukan oleh Try Indraningrum (2011) tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung, Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah", sedangkan peneliti sekarang meneliti "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur" dengan menggunakan periode penelitian tahun 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja

Langsung, Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh sumber Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal, serta pengaruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
2. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa.
3. Menganalisis pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja barang dan jasa melalui belanja modal, serta pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja barang dan jasa melalui belanja modal.
4. Menganalisis pengaruh langsung Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Barang dan Jasa serta pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa.

Penelitian ini dapat dijadikan untuk melengkapi literatur-literatur akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan pengaruh komponen Pendapatan terhadap Belanja dalam APBD. Apabila Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori-teori yang ada maka tentu ada argumentasi lain yang mendukung hasil penelitian.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri No.59/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan tersebut dirinci menurut urusan

pemerintah daerah, organisasi kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari :Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2016).

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

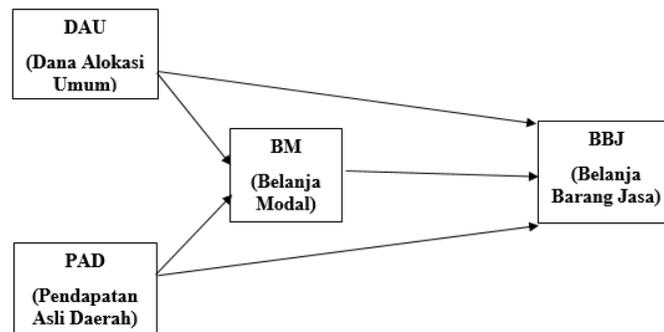
Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS



Gambar 1. Model Kerangka Konseptual

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa (BBJ).

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Tujuan pemberian DAU ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dengan belanja modal, disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

H1 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu

mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional. Dengan kata lain besarnya PAD yang akan diterima dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan domestik.

H2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

H3 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa.

Alokasi belanja barang dan jasa memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan pelayanan publik untuk masyarakat. John Wong (Adi, 2006) menunjukkan bahwa

pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar PAD selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003). Berdasarkan landasan teoritis dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:
H4 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.

Pada penelitian Abdullah dan Halim (2006) menunjukkan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan. Melihat hubungan tersebut maka seyogyanya semakin bertambahnya aset dalam belanja modal dapat berpengaruh terhadap peningkatan belanja barang dan jasa. Dalam penelitian tersebut belanja modal sebagai variabel independen berpengaruh langsung terhadap belanja barang dan jasa sebagai variabel dependen.

H5 = Belanja Modal berpengaruh yang signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.

Belanja modal menjadi variabel yang memediasi hubungan antara DAU terhadap belanja barang dan jasa. Miliasih (2012) mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Semakin tinggi DAU akan meningkatkan belanja modal dan tingginya belanja modal tersebut akan berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa. Karena setiap peningkatan belanja

modal diperkirakan akan meningkatkan pula jumlah belanja barang dan jasa.

H6 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak langsung melalui belanja modal terhadap belanja barang dan jasa

Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas yang menghasilkan aset tetap, sementara belanja pemeliharaan bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Karena belanja pemeliharaan masuk kedalam belanja barang dan jasa maka dalam penelitian ini variabel dependen dirubah menjadi belanja barang dan jasa dan belanja modal menjadi variabel intervening atau moderator.

H7 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak langsung melalui belanja modal terhadap belanja barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hubungan kausal (*causal effect*), yaitu hubungan bersifat sebab akibat (Anshori dan Iswati, 2009), yaitu pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja barang dan jasa dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2009:7).

Populasi, Sampel dan Teknik

Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur selama tahun 2019. Syarat daerah yang dijadikan sampel adalah daerah yang memiliki data-data yang lengkap yang tersedia di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (www.djpk.go.id).

Berdasarkan kriteria diperoleh sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

	Penetapan Sampel	Jumlah
1	Kabupaten/Kota di Jawa Timur	38
2	Daerah yang tidak mendapat alokasi DAU	0
3	Data tidak lengkap	5
	Jumlah Sampel	33

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual Variabel	Definisi Operasional Variabel Peneliti
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016)	Dana alokasi umum merupakan dana transfer pemerintah pusat sebagai dana perimbangan kepada daerah, dalam penelitian ini dana alokasi umum (DAU) yang digunakan merupakan total realisasi DAU pemerintah daerah tahun 2019.
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan sendiri. Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016)	Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini adalah total realisasi PAD pemerintah daerah tahun anggaran 2019.
3.	Belanja Modal (BM)	Belanja modal yang diukur dengan dua cara, yakni (1) jumlah realisasi anggaran belanja modal tahun 2004 dan (2) perubahan realisasi anggaran belanja modal tahun 2004 dibanding realisasi tahun dan 2003 karena data yang dianalisis selama 2 tahun. Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016)	Data belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan total realisasi belanja modal pemerintah daerah tahun anggaran 2019.
4.	Belanja Barang/Jasa (BBJ)	Merupakan belanja pemeliharaan yang diukur dengan dua cara, yakni (1) jumlah realisasi anggaran belanja pemeliharaan tahun 2004 dan (2) perubahan realisasi anggaran belanja pemeliharaan tahun 2004 dibanding realisasi tahun 2003. Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016)	Pada penelitian ini menggunakan istilah Belanja barang/jasa sesuai Permendagri No. 59/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Data belanja barang dan jasa yang digunakan dalam penelitian ini merupakan total realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Regresi Linier Berganda dan Analisis Path* dengan *software SPSS*.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas (Persamaan 1)

Collinearity statistic		
Variable	Toleran	VIF
DAU	0,823	1,215
PAD	0,823	1,215

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas (Persamaan 2)

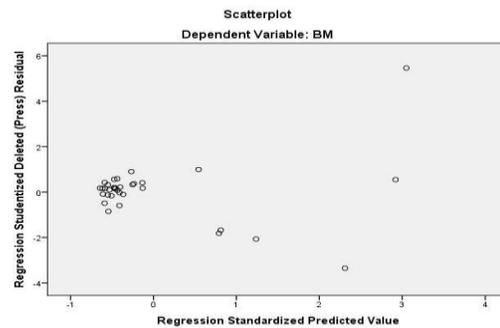
Collinearity statistic		
Variable	Toleran	VIF
DAU	0,817	1,225
PAD	0,307	3,254
BM	0,316	3,165

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 dan 4 di atas dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini tampak pada nilai *tolerance* masing- masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1). Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

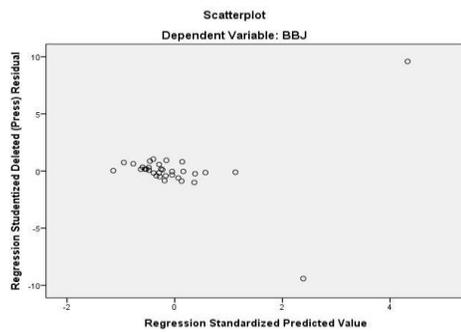
b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dari program SPSS dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

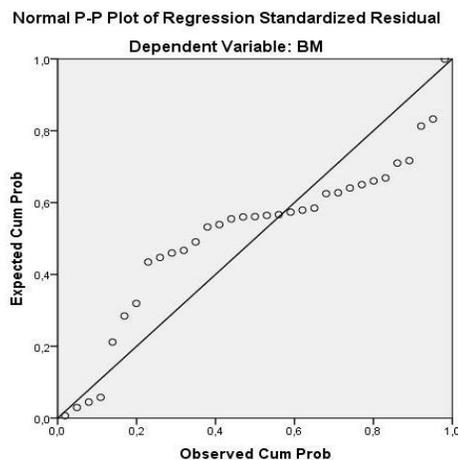


Sumber : Data primer yang diolah, 2020
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Pada gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

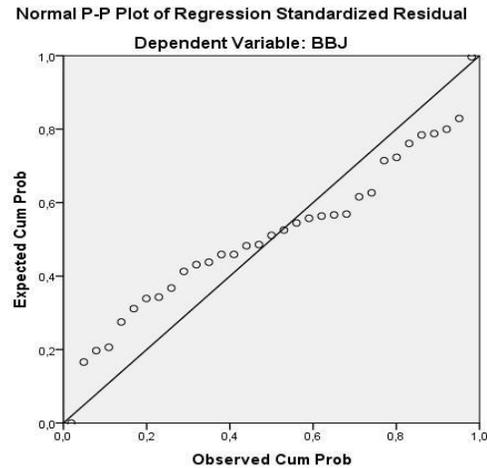
c. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas (Persamaan 1)



Sumber : Data primer yang diolah, 2020
Gambar 5. Hasil Uji Normalitas (Persamaan 2)

Pada gambar 4 dan 5 dapat dilihat bahwa grafik normal *probability plot* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar di sekitar grafik normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji statistic Durbin-Watson (Ghozali, 2013:110)

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Persamaan 1)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,827 ^a	,684	,663	3,07607E+11	1,945

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 5 dari hasil pengujian autokorelasi, perhitungan nilai *Durbin-Watson* terlihat bahwa memiliki nilai sebesar 1,945, maka berarti dalam

penelitian ini terjadi masalah autokorelasi dikarenakan *Durbin-Watson* berada pada $du < d < 4-du$ yaitu $1,3212 < 1,945 < 1,5770$.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Persamaan 2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,906 ^a	,820	,801	2,78195E+11	1,598

a. Predictors: (Constant), BM, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BBJ

Berdasarkan tabel 6 dari hasil pengujian autokorelasi, perhitungan nilai *Durbin-Watson* terlihat bahwa memiliki nilai sebesar 1,598, maka berarti dalam penelitian ini terjadi masalah autokorelasi dikarenakan *Durbin-Watson* berada pada $du < d < 4-du$ yaitu $1,2576 < 1,598 < 1,6511$.

Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan jawaban atas berbagai macam hubungan yang dikembangkan dalam model penelitian. Berikut ini merupakan hasil output SPSS untuk uji statistik persamaan I yaitu :

Tabel 7. Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi) Persamaan 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,827 ^a	,684	,663	3,07607E+11	1,945

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Tampilan output spss *model summary* menunjukkan besarnya adjusted R² sebesar 0,663, hal ini berarti 66,3% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan

oleh dua variabel independen yaitu DAU dan PAD, sedangkan sisanya (100% - 66,3% = 33,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Persamaan 1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,146E+24	2	3,073E+24	32,478	,000 ^b
	Residual	2,839E+24	30	9,462E+22		
	Total	8,985E+24	32			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Berdasarkan tabel 8 uji ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 32,478 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu DAU dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi) Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,906 ^a	,820	,801	2,78195E+11	1,598

a. Predictors: (Constant), BM, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BBJ

Hasil statistik dari *model summary* menunjukkan besarnya adjusted R² sebesar 0,801, hal ini berarti ketiga variabel independen yaitu DAU, PAD, dan Belanja Modal mampu menjelaskan

variabel Belanja Barang dan Jasa sebesar 80,1%, sedangkan sisanya (100% - 80,1% = 19,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Persamaan 2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,023E+25	3	3,410E+24	44,066	,000 ^b
	Residual	2,244E+24	29	7,739E+22		
	Total	1,248E+25	32			

a. Dependent Variable: BBJ

b. Predictors: (Constant), BM, DAU, PAD

Tampilan output SPSS ANOVA memberikan nilai F statistik 44,066 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka

dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen DAU, PAD, dan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan)

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Barang dan Jasa.

- a. Hipotesis 1 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal) dan Hipotesis 2 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal)

Pada dasarnya uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,162E+11	1,820E+11		,639	,528		
	DAU	94,229	194,850	,055	,484	,632	,823	1,215
	PAD	,305	,043	,803	7,094	,000	,823	1,215

a. Dependent Variable: BM

Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan T tabel yaitu $n = \text{jumlah sampel}$ 33 dengan $\alpha = 0,05$, maka didapat T tabel sebesar 1,692. Jadi dari hasil tiap- tiap variabel dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap BM sebagai berikut:

H1 : Uji hipotesis DAU terhadap BM dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk DAU sebesar 0,484 lebih kecil dari T tabel 1,692 dengan signifikansi sebesar 0,632 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ho diterima, maka ini menunjukkan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

H2 : Uji hipotesis PAD terhadap BM dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk PAD sebesar 7,094 lebih

besar dari T tabel 1,692 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ho ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

- b. Hipotesis 3 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa), Hipotesis 4 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa) dan Hipotesis 5 (Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa)

Pada dasarnya uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,087E+11	1,657E+11		-,656	,517		
	DAU	270,128	176,906	,133	1,527	,138	,817	1,225
	PAD	-,052	,064	-,117	-,825	,416	,307	3,254
	BM	1,109	,165	,941	6,715	,000	,316	3,165

a. Dependent Variable: BBJ

Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan T tabel yaitu $n =$ jumlah sampel 33 dengan $\alpha = 0,05$, maka didapat T tabel sebesar 1,692. Jadi dari hasil tiap- tiap variabel dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap BBJ sebagai berikut:

H₃ : Uji hipotesis DAU terhadap BBJ dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk DAU sebesar 1,527 lebih kecil dari T tabel 1,692 dengan signifikansi sebesar 0,138 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ho diterima, maka ini menunjukkan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BBJ.

H₄ : Uji hipotesis PAD terhadap BBJ dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk PAD sebesar -0,825 lebih kecil dari T tabel 1,692 dengan signifikansi sebesar 0,416 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ho diterima, maka ini menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BBJ.

H₅ : Uji hipotesis BM terhadap BBJ dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk PAD sebesar 6,715 lebih besar dari T tabel 1,692 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ho ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap BBJ.

- c. Hipotesis 6 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa)

Hipotesis 6 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak langsung terhadap belanja barang dan jasa melalui belanja modal. Hubungan tidak langsung terjadi jika ada variabel ke

tiga yang memidiasi hubungan kedua variabel ini, tetapi dengan syarat pengaruh variabel satu terhadap variabel dua signifikan demikian juga pengaruh variabel dua terhadap variabel tiga signifikan. Variabel ketiga (variabel intervening) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel Belanja Modal.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal diperoleh jika Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa, sehingga belanja modal berfungsi sebagai intervening terhadap DAU dan Belanja barang dan jasa. Perhitungannya dengan menambahkan pengaruh langsung DAU ke BBJ (p₃) dengan hasil perkalian pengaruh langsung DAU ke Belanja Modal (p₁) dan pengaruh langsung Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa (p₅).

Pengaruh langsung DAU ke BBJ = 0,133
 Pengaruh langsung DAU ke BM = 0,055
 Pengaruh langsung BM ke BBJ = 0,941
 Pengaruh tidak langsung DAU ke BBJ melalui BM = (0,055 x 0,941)

Total pengaruh DAU ke BBJ melalui BM
 $= 0,133 + (0,055 \times 0,941) = 0,185$
 Pengaruh mediasi yang ditunjukkan diatas sebesar 0,185 menunjukkan besarnya pengaruh tidak langsung DAU ke Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal.

- d. Hipotesis 7 (Pendapatan asli Daerah memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa)

Hipotesis 7 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak langsung melalui belanja modal terhadap belanja barang dan jasa. Hubungan tidak langsung terjadi jika ada variabel ke tiga yang memidiasi hubungan kedua variabel ini, tetapi dengan syarat pengaruh variabel satu

terhadap variabel dua signifikan demikian juga pengaruh variabel dua terhadap variabel tiga signifikan. Variabel ke tiga (variabel intervening) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel Belanja Modal.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal diperoleh jika PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan belanja modal berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa, sehingga belanja modal berfungsi sebagai intervening terhadap PAD dan Belanja barang dan jasa.

Total pengaruh hubungan dapat dihitung sebagai berikut :

Pengaruh langsung PAD ke BBJ = -0,117

Pengaruh langsung PAD ke BM = 0,803

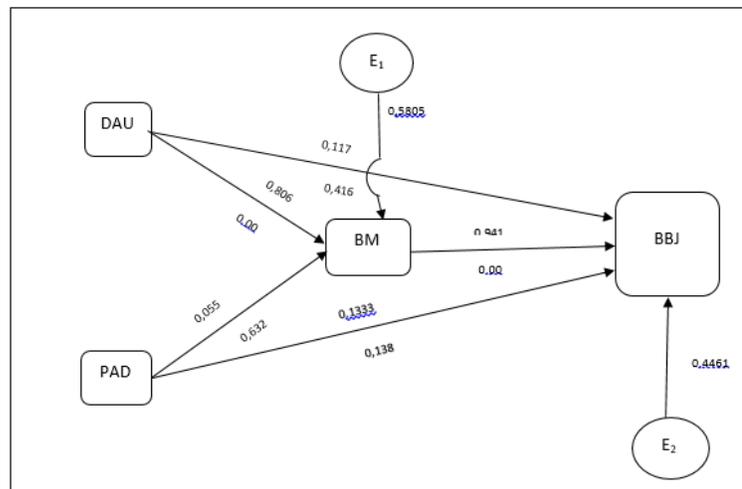
Pengaruh langsung BM ke BBJ = 0,941

Pengaruh tidak langsung PAD ke BBJ melalui BM = (0,803 x 0,941)

Total Pengaruh DAU ke BBJ melalui BM = -0,117 + (0,803 x 0,941) = 0,639

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan diatas sebesar 0,639 menunjukkan besarnya pengaruh tidak langsung PAD ke Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal.

Dari kedua uji hubungan tidak langsung diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dapat dijadikan sebagai variabel mediasi antara DAU dan PAD terhadap Belanja Barang dan Jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Belanja Barang dan Jasa mengikuti besarnya pengeluaran Belanja Modal. Dari semua hipotesis itu dapat ditampilkan dalam sebuah bagan seperti berikut:



Gambar 6. Pengaruh PAD, DAU terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa

Untuk mendapatkan nilai E1 dan E2 diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$E_1 = \sqrt{1 - 0,663} = 0,5805$$

$$E_2 = \sqrt{1 - 0,801} = 0,4461$$

$$\begin{aligned} \text{Sedangkan untuk } R^2 \text{ model} &= 1 - E_1^2 \cdot E_2^2 \\ &= 1 - 0,5805^2 \cdot 0,4461^2 \\ &= 1 - 0,3370 \cdot 1,990 \\ &= 1 - 0,0671 \\ &= 0,9329 \end{aligned}$$

PEMBAHASAN

1. Hipotesis 1 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal) Hipotesis 2 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal)

Dari hasil uji empiris menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006)

- yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berasosiasi positif Belanja Modal.
2. Hipotesis 2 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal)
 Pada hipotesis 2 juga diterima, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006) yang menyatakan bahwa pendapatan sendiri tidak berasosiasi terhadap belanja modal. Walaupun menurut Abdullah dan Halim (2006) prosentase besarnya nilai PAD dalam APBD lebih kecil daripada prosentase besarnya DAU, namun dalam penelitian ini membuktikan bahwa dengan nilai prosentase PAD mampu berpengaruh terhadap Belanja Modal. Indikasinya adalah untuk komposisi realisasi belanja daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia masih didominasi oleh Belanja Pegawai (belanja tidak langsung) yakni sebesar 47,3%, yang kemudian baru Belanja Modal.
 Dapat ditarik kesimpulan bahwa total pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja daerah masih didominasi oleh dana transfer pusat, sehingga pengaruh PAD nilainya lebih kecil. Hal ini didukung oleh Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa pengaruh DAU tetap lebih tinggi dibanding pengaruh PAD terhadap prediksi belanja.
 3. Hipotesis 3 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa)
 Hipotesis 3 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung positif terhadap Belanja Barang dan Jasa, hasil uji statistik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung positif. Artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) akan menaikkan Belanja Barang dan Jasa.
 4. Hipotesis 4 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa)
 Hipotesis 4 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa, hasil uji statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh langsung negatif. Artinya setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurunkan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini dimungkinkan bahwa nilai PAD yang relatif lebih kecil daripada DAU sehingga kurang berperan mempengaruhi Belanja Barang dan Jasa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh negatif juga dimungkinkan karena penyesuaian dan perubahan atas Kepres No.80 tahun 2003 atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditujukan agar pengadaan Barang dan Jasa dapat transparan karena pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Indikasinya selain faktor besarnya alokasi pada belanja pegawai, hal lain dimungkinkan adanya permasalahan klasik atas penurunan Belanja Barang dan Jasa yaitu penyerapan Belanja Barang dan Jasa yang tidak sempurna. Seperti dikatakan Henry (2007) dalam hukum online.com, bahwa penyebab rendahnya penyerapan anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah menyangkut pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang agak terlambat. Terjadi beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Misalnya perubahan ketujuh atas Kepres 80/2003 ini yaitu Perpres No.95 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengharuskan pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode

pelelangan terbatas, selain diumumkan secara luas melalui surat kabar, diupayakan pula melalui webside pengadaan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi adanya penyalahgunaan pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.

Permasalahan yang mungkin terjadi bahwa adanya penyesuaian pengubahan atas Kepres No.80 tahun 2003, dimana sebagian besar kabupaten/kota belum siap untuk melakukan pengadaan belanja barang dan jasa, yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran Belanja Barang dan Jasa, jadi pegawai pengadaan diharuskan memiliki sertifikasi keahlian melalui sejumlah ujian tertentu. Seperti Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional.

5. Hipotesis 5 (Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa)

Hasil pengujian statistik untuk hipotesis 5 menunjukkan bahwa hipotesis 5 diterima yang artinya bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Belanja Barang dan Jasa. Hal ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006), yang menunjukkan dalam penelitiannya bahwa Belanja Modal berasosiasi positif terhadap Belanja Pemeliharaan. Dalam Permendagri 59 tahun 2007 Belanja Pemeliharaan masuk ke dalam kategori Belanja Barang dan Jasa.

6. Hipotesis 6 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa)

Dalam Hipotesis 6 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)

berpengaruh tidak langsung positif terhadap Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal. Berdasarkan uji *path analysis* menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijadikan sebagai variabel yang memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Barang dan Jasa. Setiap penambahan aset dalam realisasi Belanja Modal akan diikuti oleh penambahan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini berarti Hipotesis 6 diterima.

7. Hipotesis 7 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa)

Pada hipotesis 7 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak langsung positif terhadap Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal. Berdasarkan uji *path analysis* menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijadikan sebagai variabel yang memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa. Setiap penambahan aset dalam realisasi Belanja Modal akan diikuti oleh penambahan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini berarti Hipotesis 7 diterima.

Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya kemandirian ini, pemerintah dituntut meningkatkan pelayanan publiknya. Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor

pendidikan, kesehatan, transportasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah belanja barang dan jasa.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menemukan bahwa Dana alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari uji yang telah dilakukan bahwa ada pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa. Dan ada pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa. Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan 1 sampai 3 dapat dikatakan bahwa Belanja Modal memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai variabel intervening antara pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa (BBJ) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menemukan bahwa:

1. Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.
4. Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.

5. Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.
6. Dana Alokasi Umum serta Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa, jadi Belanja Modal merupakan variabel intervening.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (2): 17-32*.
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. 2009, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama, Surabaya : Airlangga University Press.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Indeks.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, David dan Priyo Hari adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *JAAI*.
- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pngurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kusumadewi dan Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja

- Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah. *JAAI, 11 (1):67-80*.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta . ANDI
- Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- <http://www.perbendaharaan.go.id>